

PERANAN ADMINISTRASI PERTAHANAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PARIWISATA PINTAR BERKELANJUTAN

Frangky Silitonga¹, Tjatur Supriyono², Agung Prapsetyo³

Politeknik Pariwisata Batam, Prodi Administrasi Pertahanan Akademi Militer

Prodi Teknik Sipil Pertahanan Akademi Militer

frangkyka@btp.ac.id¹, tjatursupriyono96@gmail.com², kinggoenk@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan administrasi pertahanan dalam mendukung pengelolaan pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan manajemen strategis dan tata kelola destinasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dari regulasi nasional, laporan lembaga internasional, dan jurnal ilmiah terkait pertahanan dan pariwisata pintar berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa administrasi pertahanan berkontribusi dalam menciptakan stabilitas keamanan destinasi, penguatan manajemen risiko lingkungan dan sosial, perlindungan kawasan strategis nasional, serta dukungan terhadap infrastruktur berkelanjutan berbasis konsep dual-use. Sinergi antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menjadi faktor penting dalam mewujudkan pariwisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kata kunci: administrasi pertahanan, manajemen pariwisata, keamanan destinasi, ketahanan nasional, manajemen risiko.

THE ROLE OF DEFENSE ADMINISTRATION IN THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE SMART TOURISM MANAGEMENT

Abstract

This study aims to analyze the role of defense administration in supporting sustainable tourism management through strategic management approaches and destination governance. The method used is qualitative descriptive based on literature studies from national regulations, reports of international institutions, and scientific journals related to sustainable defense and smart tourism management. The results of the study show that defense administration contributes to creating destination security stability, strengthening environmental and social risk management, protecting national strategic areas, and supporting sustainable infrastructure based on the dual-use concept. The synergy between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia is an important factor in realizing safe, resilient, and sustainable tourism.

Keywords: defense administration, tourism management, destination security, national resilience, risk management.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa negara (WOT, 2025). Dalam perspektif manajemen pariwisata, keberhasilan suatu destinasi sangat dipengaruhi oleh aspek keamanan (*safety and security*), stabilitas politik, dan kepastian hukum. Ketika terjadi gangguan keamanan, konflik, atau ancaman terorisme, dampaknya langsung terasa pada penurunan kunjungan wisatawan dan melemahnya citra destinasi (TWC, 2024). Manajemen pariwisata memiliki implikasi strategis terhadap ketahanan dan pertahanan negara, terutama dalam konteks pembangunan nasional yang terintegrasi. Pariwisata tidak hanya dipahami sebagai sektor ekonomi yang menghasilkan devisa, tetapi juga sebagai instrumen *soft power* yang memperkuat posisi suatu negara dalam sistem internasional (BPS, 2024). Pengelolaan destinasi yang profesional, berbasis tata kelola yang baik (*good governance*), keamanan destinasi, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial akan menciptakan stabilitas kawasan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketahanan nasional secara menyeluruh.



Dari perspektif ekonomi pertahanan, sektor pariwisata berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah perbatasan dan daerah strategis (UNWTO, 2025b). Destinasi yang berkembang dengan baik—termasuk di wilayah pesisir dan perbatasan—mampu mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menekan potensi konflik horizontal. Stabilitas sosial-ekonomi tersebut merupakan fondasi penting dalam mendukung sistem pertahanan negara yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, manajemen pariwisata yang efektif juga berkontribusi terhadap ketahanan sosial-budaya. Pelestarian kearifan lokal, penguatan identitas nasional, serta promosi budaya melalui aktivitas pariwisata akan meningkatkan rasa kebangsaan dan kohesi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, pariwisata berfungsi sebagai media diplomasi budaya yang memperkuat citra positif negara di mata internasional. Citra negara yang stabil, aman, dan terbuka akan memperkuat posisi strategis dalam hubungan bilateral maupun multilateral (UNWTO, 2025a).

Lebih lanjut, pengelolaan destinasi berbasis keamanan (tourism security management) menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan non-militer. Integrasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku industri, dan masyarakat dalam menjaga keamanan destinasi mencerminkan implementasi sistem pertahanan semesta (Gunawan et al., 2019). Dengan demikian, manajemen pariwisata tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan (Shaleh & Wisnaeni, 2019).

Konsep Administrasi Pertahanan

Administrasi pertahanan merupakan proses pengelolaan sumber daya pertahanan negara yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta koordinasi kebijakan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Konsep ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, logistik, serta strategi keamanan yang mendukung stabilitas nasional. Dalam perspektif manajemen modern, administrasi pertahanan juga melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor ekonomi dan pariwisata, guna menjaga kesiapan negara dalam menghadapi berbagai ancaman baik militer maupun non-militer (Administrasi Pertahanan Akmil, 2020). Dalam konteks pariwisata, administrasi pertahanan memiliki peran strategis dalam menciptakan keamanan destinasi, stabilitas sosial, serta perlindungan terhadap aset nasional seperti wilayah pesisir, pulau terluar, dan kawasan strategis pariwisata.

Administrasi pertahanan sebagai sistem tata kelola kebijakan dan sumber daya pertahanan negara memiliki peran tidak langsung namun strategis dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya ancaman non-militer, integrasi antara kebijakan pertahanan dan manajemen pariwisata menjadi kebutuhan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan daya saing destinasi (Aksa et al., 2022). Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan destinasi yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks global, isu perubahan iklim, bencana alam, konflik geopolitik, serta ancaman keamanan non-militer menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan sektor pariwisata. Stabilitas keamanan dan ketahanan nasional menjadi prasyarat utama bagi terciptanya destinasi yang berkelanjutan. Administrasi pertahanan sebagai bagian dari sistem administrasi publik memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan wilayah, melindungi sumber daya strategis, serta memperkuat ketahanan nasional. Dalam perspektif manajemen pariwisata berkelanjutan, stabilitas keamanan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial masyarakat lokal.

Administrasi pertahanan merupakan cabang administrasi publik yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pertahanan negara. Konsep interdependensi yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa stabilitas keamanan nasional memiliki implikasi luas terhadap sektor ekonomi, termasuk industri pariwisata (Administrasi Pertahanan Akmil, 2020).

Administrasi Pertahanan dan Ketahanan Nasional

Administrasi pertahanan adalah proses pengelolaan kebijakan dan sumber daya pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara



menegaskan bahwa pertahanan mencakup dimensi militer dan non-militer, termasuk perlindungan wilayah strategis dan sumber daya nasional (Undang-Undang Pertahanan Negara, 2002). Konsep interdependensi global dari Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi saling berkaitan dalam sistem global modern.

Secara konseptual, administrasi pertahanan dan manajemen pariwisata memiliki keterkaitan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketahanan destinasi wisata. Pariwisata hanya dapat berkembang apabila terdapat kondisi keamanan dan ketertiban yang terjamin. Sistem pertahanan negara yang kuat akan menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan investor. Selain itu, keterlibatan institusi pertahanan juga dapat mendukung pengembangan destinasi melalui kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur di kawasan wisata strategis. Dalam beberapa penelitian, peran institusi militer dalam operasi selain perang juga dapat mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat (Administrasi Pertahanan Akmil, 2020).

Manajemen Pariwisata dan Keamanan Destinasi

Teori manajemen destinasi, keamanan merupakan komponen utama daya saing. Manajemen pariwisata tidak hanya mengelola atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, tetapi juga aspek manajemen risiko, mitigasi krisis, dan perlindungan wisatawan (Nasution et al., 2024). Gangguan keamanan dapat memengaruhi *destination image* dan kepercayaan pasar internasional. Manajemen pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pengelolaan destinasi yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaat pariwisata dapat dinikmati secara jangka panjang. Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan. Administrasi publik memiliki peran penting dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan destinasi wisata (Silitonga et al., 2023). Dalam perspektif teori pembangunan berkelanjutan, pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.

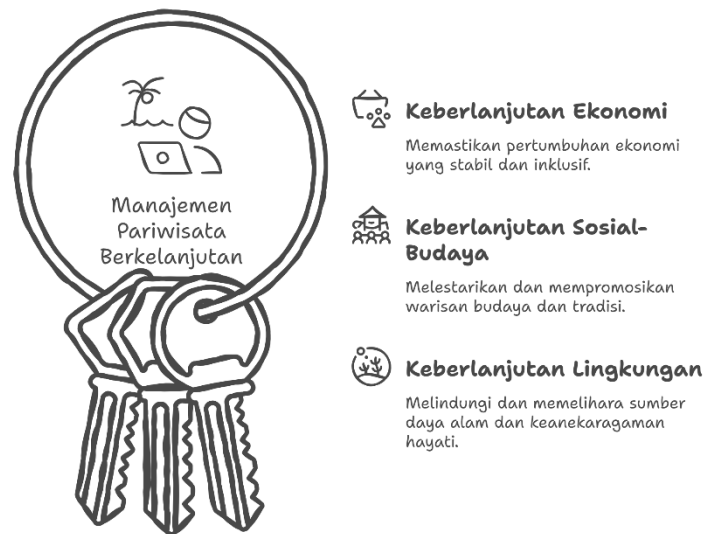
Manajemen Pariwisata Berkelanjutan

Menurut World Tourism Organization, pariwisata berkelanjutan adalah pengelolaan seluruh sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi tanpa merusak integritas budaya, proses ekologis, serta sistem pendukung kehidupan (WOT, 2025). Dalam manajemen pariwisata berkelanjutan, terdapat tiga pilar utama:

1. Keberlanjutan ekonomi
2. Keberlanjutan sosial-budaya
3. Keberlanjutan lingkungan

Keamanan dan stabilitas menjadi fondasi bagi ketiga pilar tersebut.

Pilar Pariwisata Berkelanjutan



Gambar 1. Pilar Pariwisata Berkelanjutan

Konsep Smart Tourism Management

Smart tourism merupakan pendekatan pengelolaan destinasi berbasis teknologi digital, sistem informasi, dan inovasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi pelayanan wisata, keamanan, serta pengalaman wisatawan. Konsep ini memanfaatkan teknologi seperti big data, Internet of Things (IoT), dan sistem informasi destinasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif (Harijanto et al., 2015). Dalam konteks pertahanan, penggunaan teknologi digital juga dapat mendukung sistem monitoring keamanan destinasi, pengelolaan data wisatawan, serta mitigasi risiko terhadap ancaman keamanan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi internasional, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan administrasi pertahanan dan pariwisata berkelanjutan.

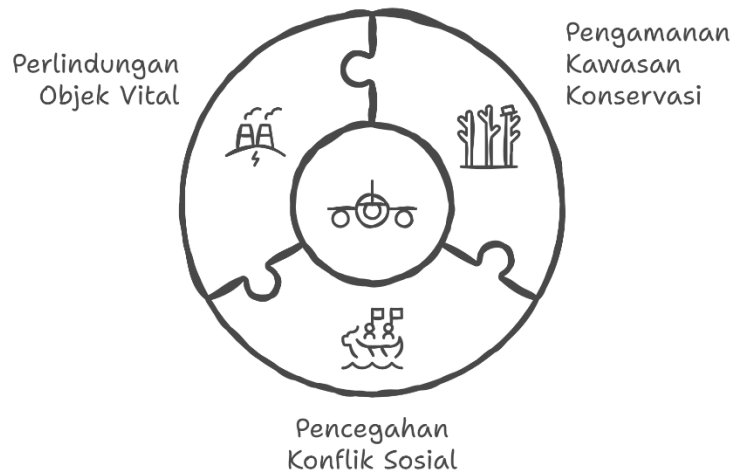
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Administrasi Pertahanan dan Keamanan Destinasi Berkelanjutan

Keamanan merupakan indikator penting dalam keberlanjutan destinasi. Administrasi pertahanan mendukung:

- Pengamanan kawasan konservasi strategis
- Pencegahan konflik sosial di destinasi wisata
- Perlindungan objek vital nasional

Peran Administrasi Pertahanan dalam Keamanan



Gambar 2. Peranan Administrasi Pertahanan dalam Keamanan

Destinasi yang aman meningkatkan kepercayaan wisatawan dan menjaga kesinambungan ekonomi lokal.

2. Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Strategis

Dalam perspektif pertahanan modern, sumber daya alam merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Kawasan wisata bahari, hutan lindung, dan taman nasional memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai strategis (Silitonga et al., 2024).

Contoh Relevan: Penguatan Keamanan di Kawasan Natuna

Pengembangan pariwisata bahari di wilayah Natuna tidak hanya bertujuan meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Stabilitas keamanan yang dijaga aparat pertahanan mendukung investasi dan aktivitas pariwisata secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kedaulatan wilayah.

3. Infrastruktur Berkelanjutan dan Konsep Dual-Use

Infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan jalan nasional memiliki fungsi ganda:

- Mendukung mobilitas wisatawan
- Mendukung kesiapsiagaan pertahanan dan logistik darurat

Konsep ini memperlihatkan bahwa pembangunan destinasi berkelanjutan dapat selaras dengan kepentingan pertahanan negara.

4. Manajemen Krisis dan Ketahanan Pariwisata

Pariwisata berkelanjutan memerlukan sistem mitigasi risiko terhadap:

- Bencana alam
- Konflik sosial
- Ancaman keamanan

Administrasi pertahanan berperan dalam koordinasi lintas sektor untuk mempercepat respons krisis, termasuk evakuasi wisatawan dan pengamanan wilayah terdampak. Sebagai contoh, pasca Bom Bali 2002, penguatan sistem keamanan nasional berdampak pada pemulihan bertahap industri pariwisata Bali (Maythu et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat keberlanjutan destinasi.

Peranan Administrasi Pertahanan dalam Perspektif Manajemen Pariwisata

1. Menjamin Keamanan dan Stabilitas Destinasi. Administrasi pertahanan berperan dalam menciptakan stabilitas wilayah yang menjadi fondasi keberhasilan manajemen destinasi. Keamanan yang terjaga meningkatkan persepsi positif wisatawan dan investor. Tanpa stabilitas keamanan, strategi pemasaran destinasi tidak akan efektif.
2. Penguatan Manajemen Risiko dan Krisis Pariwisata. Dalam manajemen pariwisata modern, pengelolaan risiko menjadi bagian penting. Administrasi pertahanan mendukung sistem deteksi dini terhadap ancaman keamanan, konflik, dan gangguan siber yang dapat memengaruhi sektor pariwisata. Koordinasi lintas sektor membantu mempercepat respons saat terjadi krisis.

Sinergi Administrasi Pertahanan dan Pariwisata



Gambar 3. Sinergi Administrasi Pertahanan dan Manajemen Pariwisata Pintar

3. Dukungan Infrastruktur Dual-Use. Banyak infrastruktur pariwisata seperti bandara, pelabuhan, dan jalan strategis memiliki fungsi ganda. Infrastruktur tersebut tidak hanya melayani wisatawan tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan logistik dan mobilisasi saat keadaan darurat. Hal ini menunjukkan sinergi antara pembangunan pariwisata dan kesiapan pertahanan.
4. Penguatan Daya Saing dan Citra Internasional. Stabilitas keamanan yang dikelola melalui administrasi pertahanan meningkatkan reputasi internasional suatu negara. Dalam manajemen pariwisata, citra destinasi sangat dipengaruhi oleh persepsi keamanan. Negara yang aman memiliki daya tarik lebih tinggi dalam pasar global.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dari perspektif manajemen pariwisata, administrasi pertahanan berkontribusi pada aspek *governance* destinasi. Keamanan menjadi variabel eksternal yang memengaruhi keberlanjutan industri pariwisata (Gretzel et al., 2015). Pembangunan destinasi di wilayah perbatasan atau kawasan strategis juga memiliki dimensi geopolitik yang memperkuat kehadiran negara (*state presence*). Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional memperkuat kapasitas fiskal negara, yang pada akhirnya mendukung pembiayaan pertahanan. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara stabilitas pertahanan dan pertumbuhan pariwisata dalam kerangka ketahanan nasional.

Analisis Hasil Penelitian

Konsep Administrasi Pertahanan dalam Mendukung Pariwisata

Administrasi pertahanan merupakan proses pengelolaan kebijakan, sumber daya, organisasi, dan strategi pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan wilayah serta stabilitas keamanan nasional. Dalam konteks pariwisata, administrasi pertahanan berperan dalam menciptakan kondisi keamanan dan stabilitas wilayah yang menjadi faktor utama dalam perkembangan destinasi wisata. Dalam perspektif manajemen pariwisata modern, keamanan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan destinasi

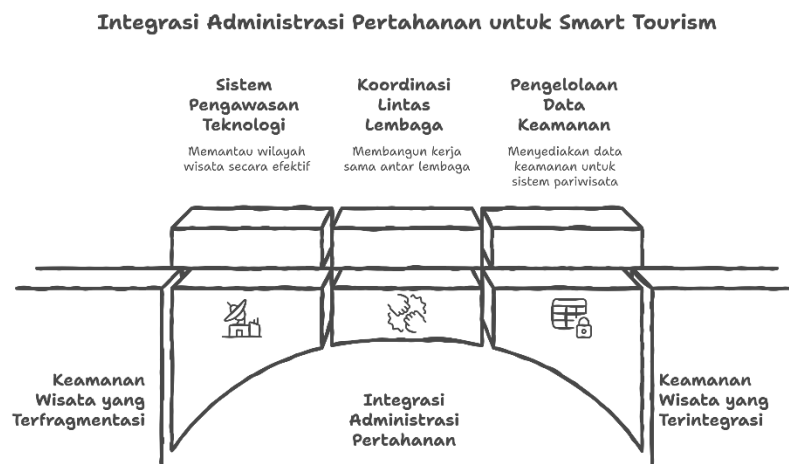
wisata. Wisatawan cenderung memilih destinasi yang memiliki sistem keamanan yang baik serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, administrasi pertahanan dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata, khususnya di wilayah yang memiliki potensi wisata alam, budaya, maupun bahari.

Selain itu, administrasi pertahanan juga berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan, pulau terluar, dan kawasan strategis yang seringkali memiliki potensi wisata tinggi. Dengan pengelolaan pertahanan yang efektif, kawasan tersebut dapat dikembangkan secara aman dan berkelanjutan sebagai destinasi wisata.

Integrasi Administrasi Pertahanan dengan Konsep Smart Tourism

Pariwisata pintar (smart tourism) merupakan konsep pengelolaan pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem digital, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan wisata serta pengalaman wisatawan. Dalam hal ini, administrasi pertahanan dapat mendukung pengembangan smart tourism melalui:

1. Sistem pengawasan wilayah berbasis teknologi. Administrasi pertahanan dapat memanfaatkan teknologi seperti sistem pemantauan maritim, drone, dan satelit untuk menjaga keamanan kawasan wisata, khususnya wisata bahari dan wilayah perbatasan.
2. Koordinasi lintas lembaga. Pengelolaan keamanan destinasi wisata membutuhkan kerja sama antara berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pengelola pariwisata. Administrasi pertahanan berperan dalam membangun koordinasi tersebut sehingga tercipta sistem keamanan yang terintegrasi.
- 3.



Gambar 4. Integrasi Administrasi Pertahanan untuk Smart Tourism

4. Pengelolaan data dan informasi keamanan wisata. Dalam konsep smart tourism, informasi keamanan menjadi bagian penting dalam sistem manajemen destinasi. Administrasi pertahanan dapat menyediakan data terkait kondisi keamanan wilayah yang dapat diintegrasikan dalam sistem informasi pariwisata.

Peran Administrasi Pertahanan dalam Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan menekankan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Administrasi pertahanan dapat berperan dalam mendukung keberlanjutan tersebut melalui beberapa aspek:

1. Perlindungan wilayah dan sumber daya alam. Pengamanan kawasan strategis seperti taman nasional, kawasan pesisir, dan pulau terluar dapat mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan wisata.
2. Stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Stabilitas sosial merupakan faktor penting dalam keberlanjutan pariwisata. Administrasi pertahanan membantu menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat serta wisatawan.

3. Penguatan ketahanan wilayah wisata. Ketahanan wilayah wisata dapat ditingkatkan melalui kesiapsiagaan terhadap ancaman keamanan, bencana alam, maupun aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perompakan yang dapat mengganggu sektor pariwisata.



Gambar 5. Peran Administrasi Pertahanan dalam Pariwisata Berkelanjutan

Hasil Pembahasan Penelitian

Hubungan Strategis Pertahanan dan Pariwisata

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara sistem pertahanan negara dan pengembangan pariwisata. Keamanan wilayah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya tarik destinasi wisata. Negara atau daerah yang memiliki sistem pertahanan yang kuat cenderung memiliki tingkat kepercayaan wisatawan yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, administrasi pertahanan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan wilayah maritim yang menjadi salah satu potensi utama pariwisata nasional.

Implementasi Administrasi Pertahanan dalam Pengembangan Pariwisata

Implementasi administrasi pertahanan dalam pengelolaan pariwisata dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:

1. Penguatan keamanan destinasi wisata. Aparat pertahanan dan keamanan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan kawasan wisata.
2. Pengembangan kawasan wisata di wilayah perbatasan. Banyak wilayah perbatasan Indonesia memiliki potensi wisata yang besar. Dengan dukungan administrasi pertahanan yang baik, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata baru.
3. Penggunaan teknologi dalam pengawasan destinasi. Teknologi seperti CCTV, sistem monitoring maritim, dan aplikasi digital dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Studi Kasus: Pengembangan Pariwisata Bahari di Wilayah Perbatasan

Sebagai contoh, beberapa wilayah perbatasan Indonesia seperti Kepulauan Natuna memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari. Namun, kawasan ini juga memiliki nilai strategis dalam pertahanan negara. Dalam hal ini, administrasi pertahanan dapat berperan dalam:

1. Menjaga keamanan wilayah laut

2. Mengawasi aktivitas ilegal seperti illegal fishing
3. Mendukung pembangunan infrastruktur keamanan yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata

Dengan demikian, pengelolaan wilayah tersebut dapat memberikan manfaat ganda, yaitu sebagai kawasan pertahanan sekaligus destinasi wisata berkelanjutan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi pertahanan tidak hanya berfungsi dalam konteks militer, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sektor lain, termasuk pariwisata. Implikasi dari penelitian ini antara lain:

1. Perlunya integrasi kebijakan antara sektor pertahanan dan pariwisata
2. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan
3. Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keamanan destinasi wisata

Dengan integrasi tersebut, pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara aman, inovatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Administrasi pertahanan memiliki peranan strategis dalam perspektif manajemen pariwisata melalui penciptaan stabilitas keamanan, dukungan manajemen risiko destinasi, penguatan infrastruktur strategis, serta peningkatan citra internasional. Integrasi kebijakan antara sektor pertahanan dan pariwisata menjadi langkah penting dalam mewujudkan destinasi yang aman, kompetitif, dan berkelanjutan. Dari perspektif manajemen pariwisata berkelanjutan, administrasi pertahanan berkontribusi dalam:

1. Menjamin stabilitas keamanan sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi.
2. Melindungi sumber daya lingkungan sebagai aset strategis nasional.
3. Mendukung tata kelola destinasi berbasis kolaborasi lintas sektor.
4. Memperkuat citra internasional negara sebagai destinasi aman dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hubungan antara administrasi pertahanan dan pariwisata berkelanjutan bersifat interdependen dan strategis. Sinergi kelembagaan dan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga selaras dengan kepentingan strategis nasional. Administrasi pertahanan memiliki peranan signifikan dalam mendukung manajemen pariwisata berkelanjutan melalui penciptaan stabilitas keamanan, perlindungan sumber daya strategis, penguatan manajemen risiko, serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Integrasi kebijakan pertahanan dan pariwisata menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional yang komprehensif. Keberlanjutan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari stabilitas keamanan. Oleh karena itu, koordinasi antara sektor pertahanan dan sektor pariwisata menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Secara ilmiah, peranan administrasi pertahanan dalam perspektif manajemen pariwisata pintar berkelanjutan menunjukkan bahwa keamanan, stabilitas nasional, serta tata kelola pemerintahan yang efektif merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Integrasi antara kebijakan pertahanan, teknologi pariwisata pintar, dan prinsip keberlanjutan akan menghasilkan sistem pengelolaan destinasi yang tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi Pertahanan Akmil. (2020). Jurnal Dijakusuma. *Jurnal Dwijakusuma*, 1–23.
- Aksa, Maruli, S., Manik, T., & Dinata, U. (2022). Pemahaman Hukum Administrasi Pertahanan Bagi Masyarakat Desa Sangkar Kabupaten Indragiri Hilir Guna Mencegah Konflik Dan Sengketa Pertahanan. *Mimbar Kedilan*, 15(01), 68–80.
- Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999). *Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis* (2nd ed.). Longman.
- BPS. (2024). Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Februari 2024. In B. Bali (Ed.), *BPS Bali* (Perkembang, Issue 22).



<https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/04/01/717892/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-februari-2024.html>

- Bruneau, T. C., & Matei, F. C. (2008). Towards a new conceptualization of democratization and civil–military relations. *Democratization*, 15(5), 909–929.
- Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart tourism destinations. In Z. Xiang & I. Tussyadiah (Eds.), *Information and communication technologies in tourism 2014* (pp. 553–564). Springer.
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25.
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). *Smart Tourism Foundations and Developments*. Gunawan, S., Ketut, G. A., & Anna, L. (2019). *Hukum Administrasi Pertahanan* (Y. S. Hayati (ed.)). RajaGrafindo Persada.
- Harijanto, B., Silitonga, F., & Rukmono, L. Y. W. (2015). Teknologi Informasi Pertahanan. In M. Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna, Ritauw Brigjen TNI Hari, A. Brigjen TNI Fierman Sjaifirial, W. Kolonel Arh Dr. Heri, & H. Ir. Sri (Eds.), *Lakeisha* (1st ed.). Lakeisha. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=QOpTK9EAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=QOpTK9EAAAAJ:kh2fBNsKQNwC
- Maythu, Y., Kwok, A. O. J., & Teh, P. L. (2024). Blockchain technology diffusion in tourism: Evidence from early enterprise adopters and innovators. *Heliyon*, 10(2), e24675. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24675>
- Nasution, M. N., Silitonga, F., Cahayani, K., & Yuliarti, N. (2024). *Pariwisata dan Kewirausahaan* (Referensi). Puslitabmas Politeknik Pariwisata Batam. <http://repository.btp.ac.id/36/>
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>
- Silitonga, F., Nasution, M. N. A., Asman, A., Siswanto, D. J., Kristiani, N., Lufti, A., Baidlowi, M., Prapsetyo, A., Supriyono, T., Sianipar, B., Kartika Cahayani, Okta Safitri, Bram Handoko, Dinda Aisyah Nurul Intan, M. Khoru Kurnia Subagja, Silitonga, F., Alamsyah, H. N., Nitit, Y. N., Muryanto, ... Andesta, I. (2023). Pengembangan Objek Wisata Sebagai Investasi Masyarakat Di Pulau Lance. *Jurnal Keke*, 2(1), 5–24. <https://doi.org/10.59193/jkw.v2i2.270>
- Silitonga, F., Respa, C., & Widyandaru, R. Z. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tembesi Melalui Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat PT Perusahaan Gas Negara (Offtake Stasiun Panaran) Dengan Politeknik Pariwisata Batam. *Jurnal Sigma*, 2(1), 1–12.
- TWC. (2024). Laporan Keberlanjutan Tahun 2023. In P. TWCB (Ed.), *Laporan Tahunan* (Sustainabi). Taman Wisata Candi Borobudur. https://cimory.com/uploads/investors/SR CMRY_2023_FINAL.pdf
- UNWTO. (2025a). *Tourism Statistics Database*. UN Tourism. https://en.unwto-ap.org/news/worldtourismbarometer_jan2025/?utm_source=chatgpt.com
- UNWTO. (2025b). *World Tourism Barometer January 2025 UN Tourism*. https://en.unwto-ap.org/news/worldtourismbarometer_jan2025/?utm_source=chatgpt.com
- Undang-Undang Pertahanan Negara, Pemerintah Pusat 23 (2002). <https://www.bing.com/search?q=Undang+-+Undang+Nomor+3+Tahun+2002+tentang+Pertahanan+Negara&form=ANNTHT1&refig=9b98234a0e0c489abf2c388c31e9cd8c&pc=U531>
- WOT. (2025). World Tourism Barometer. *UN Tourism*, 23(1), 1–9.